

Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo

Dini Ariyani¹, Abdul Hakim², Irwan Noor³

Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan *survey*, dengan maksud penjelasan (*explanatory research*). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo dengan tingkat pengaruh kuat, dan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 51,4%. Demikian juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Edward C III bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : pengaruh, komunikasi, sumberdaya, sikap, struktur, birokrasi, implementasi

Abstract

The purpose of this study was to describe the extent to which factors of communication, resources, attitudes implementers, and bureaucratic structures on output agropolitan development program implementation in Probolinggo, either simultaneously or partially. This study used quantitative methods, with a survey approach, with the intention of explanation (explanatory research). Data analyzed using multiple linear regression. Based on the results of analysis, it can be concluded that the variables of communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structures positive and significant effect on output simultaneous implementation of development programs agropolitan Probolinggo with strong relationship level, and the contribution of the independent variable on the dependent variable by 51, 4%. Likewise, it was found that partial variables positive and significant effect on output simultaneously implementing development programs agropolitan Probolinggo. The results of this study are consistent with the theory stated by Edward C. III that the policy implementation is influenced by four factors, communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structure.

Key Words : *influenced, communication, resources, attitudes, bureaucratic, structure, implementation*

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di perkotaan lebih cepat bila dibandingkan dengan pedesaan, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya industrialisasi di perkotaan. Bagi perkotaan, dampak positif dari industrialisasi tersebut adalah semakin pesatnya angka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,

sedang dampak negatifnya adalah tingginya angka urbanisasi dan banyaknya bangunan industri yang didirikan akan mengakibatkan polusi dimana-mana dan tingginya angka pengangguran yang memicu angka kejahatan. Dampak yang terjadi di pedesaan adalah tersedotnya potensi pedesaan ke perkotaan baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, bahkan modal. Karena pengaruh dari pesatnya perkembangan industrialisasi inilah yang menyebabkan pedesaan semakin tertinggal.

Oleh sebab itu, haruslah diambil suatu kebijakan untuk lebih memperhatikan

Alamat Korespondensi Penulis:

Dini Ariyani

Email : dhonna_stat03@yahoo.com

Alamat : Jl.Yos Sudarso 135 Pabean Dringu Probolinggo
67271

pembangunan sektor pertanian di pedesaan, salah satunya adalah dengan menggunakan konsep pengembangan kawasan agropolitan. Konsep agropolitan adalah dengan memberikan pelayanan perkotaan di kawasan-kawasan pedesaan, seperti pelayanan produksi, pemasaran, teknik budidaya, permodalan, jasa-jasa serta masalah-masalah lainnya yang ada kaitannya dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Sejak ditetapkan tahun 2008, Kabupaten Probolinggo telah mengimplementasikan program pengembangan kawasan agropolitan, namun sejauh ini tingkat keberhasilan atau outputnya belum terlihat jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo, khususnya faktor-faktor yang diteoreman oleh [1] yang meliputi faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut dipilih peneliti sebagai variabel independen karena dari teori-teori implementasi yang ada, variabel-variabel tersebut merupakan hal pokok yang harus ada dalam proses implementasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari implementasi itu sendiri, sebagaimana yang diteoreman oleh [2]. Sedang pengukuran dari keberhasilan implementasi kebijakan adalah dari proses dan outputnya [3]. Untuk penelitian ini, keberhasilan implementasi program dinilai dari outputnya dengan indikator yang terdapat dalam *Masterplan* Agropolitan Kabupaten Probolinggo.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas peneliti mencoba merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Sejauhmana variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap output implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo?
2. Sejauhmana variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap output implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo?

TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan sejauhmanakah pengaruh variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara bersama-sama terhadap output implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo,
2. Menjelaskan sejauhmanakah pengaruh variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara parsial terhadap output implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan survey, dengan maksud penjelasan (*explanatory research*). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian, yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik, meliputi normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: komunikasi (X1), sumberdaya (X2), sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (X4). Sedangkan Variabel terikatnya adalah output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo (Y). Untuk Skala pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini digunakan skala Likert, yaitu dengan memberikan nilai (skor) pada masing-masing pilihan jawaban, sebagai berikut:

- a. jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1;
- b. jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2;
- c. jawaban Netral (N) diberi skor 3;
- d. jawaban Setuju (S) diberi skor 4;
- e. jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo;
2. Sumberdaya, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan peralatan atau perlengkapan guna mendukung kelancaran implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo;
3. Sikap pelaksana, yaitu sikap atau tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaksana

kebijakan dalam proses implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo;

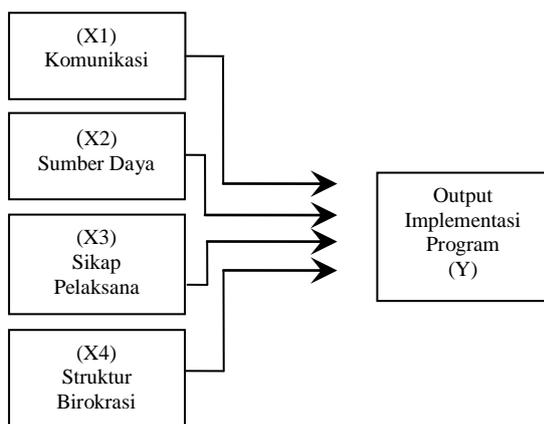
4. Struktur birokrasi, yaitu kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta batas-batas formal jabatan dalam implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo.

Definisi operasional untuk variabel terikat adalah: output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo yang pengukuran indikatornya terdapat dalam Dokumen Perencanaan (*Masterplan*) Agropolitan Kabupaten Probolinggo.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

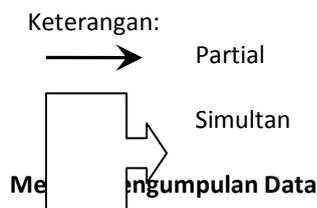
1. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara simultan terhadap output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo;
2. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara parsial terhadap output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo.

Berikut gambaran hipotesisnya :



Sumber: dimodifikasi dari Edward (1980:148)

Gambar 1. **Model Hipotesis**



Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan tehnik kuesioner, dokumentasi, dan wawancara terhadap beberapa anggota kelompok kerja yang menguasai bidangnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang tercantum dalam [4] tahun Anggaran 2008 dengan sejumlah 64 orang.

Sampel diambil dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan cara diundi. Banyak sample ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu didapat responden sebanyak 55 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel1 Rekapitulasi Variabel Bebas Penelitian

Variabel	Modus
Komunikasi	4
Sumberdaya	4
Sikap Pelaksana	4
Struktur Birokrasi	4

Sumber: data diolah, 2014

Berdasar tabel 1 diperoleh data bahwa modus dari keempat variabel bebas adalah 4, yang berarti bahwa sebagian besar responden setuju akan pentingnya komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi program pengembangan kawasan Agropolitan dalam pencapaian outputnya.

Tabel 2 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	β	t	Sig t
Konstanta	-11,11		-2,006	0,050
Komunikasi (X1)	0,475	0,300	2,563	0,013
Sumberdaya (X2)	0,319	0,252	2,129	0,038
Sikap Pelaksana (X3)	0,365	0,220	2,212	0,032
Struktur Birokrasi (X4)	0,376	0,273		0,023
R	= 0,717			
R Square	= 0,514			
Adjusted R Square	= 0,475			
F hitung	= 13,235			
Sig F	= 0,000			

Sumber: Output SPSS version 17, data diolah 2014

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama terhadap Y (R) adalah sebesar 0,717. Kesimpulannya bahwa keeratan pengaruh termasuk dalam kategori positif dan kuat. Nilai koefisien determinan (R Square)

adalah sebesar 0,514, yang berarti bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada penelitian ini sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 48,6% variasi nilai Y dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama dapat dilihat dari koefisien B keempat variabel bebas yang bernilai positif dengan signifikansi F_{hitung} sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dari tabel 4.2 diatas, juga diperoleh nilai signifikansi t_{hitung} dari X1, X2, X3, dan X4, lebih kecil daripada α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara parsial juga memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi sebagaimana dikemukakan oleh [5] bahwa komunikasi memainkan peran penting bagi berlangsungnya implementasi pada umumnya. Namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Walaupun sistem informasi manajemen mungkin dapat membantu dalam memadukan arus informasi yang diperlukan, informasi ini belum bisa menjamin bahwa data, saran dan perintah-perintah yang dihasilkan benar-benar dimengerti sebagai apa yang dikehendaki oleh pihak yang mengirimnya.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan faktor yang paling dominan dalam implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo. Mengingat arti penting komunikasi dalam implementasi program serta sulitnya mewujudkan informasi yang sempurna bagi seluruh anggota tim koordinasi perencanaan dan tim kelompok kerja maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan komunikasi yang lebih menyeluruh. Upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA harus didukung oleh ketua pokja serta seluruh anggota tim kelompok kerja sehingga tercipta komunikasi yang lebih sempurna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi diperlukan tidak hanya terbatas pada tingkatan pemerintahan saja, namun lebih dari pada itu komunikasi yang baik harus tercipta antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di

Kabupaten Probolinggo baik dalam forum formal maupun informal.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi. Sumber daya dalam penelitian ini adalah input yang digunakan agar program dapat terlaksana dengan baik yaitu berupa sumberdaya manusia, data dan informasi penunjang, serta fasilitas yang meliputi sarana prasarana dan dana. Sebagian besar responden menilai bahwa sumberdaya tersebut sudah mencukupi dalam upaya mencapai tujuan program. Sumberdaya yang dinilai sudah mencukupi dalam implementasi program adalah sumberdaya. Sumberdaya manusia secara kuantitas dalam tim POKJA berjumlah 64 orang, dan diluar tim POKJA masih banyak lagi. Sedang secara kualitas diketahui bahwa semua responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kemampuan yang tinggi dalam implementasi program. Namun demikian terdapat beberapa responden yang menyatakan sumberdaya yang diperlukan masih terbatas, khususnya sumberdaya dana dan data.

Menurut beberapa narasumber, selama ini dana yang tersedia untuk program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo adalah sangat terbatas dan hanya bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi, sedang yang dari pemerintah pusat (APBN) tidak ada. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten juga masih dirasa terbatas dibandingkan dengan APBD Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih sangat bergantung pada instansi sektoral di tingkat yang lebih tinggi. Data-data yang diperlukan tersedia, namun belum terdistribusi dengan baik kepada semua SKPD. Selain itu data potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga perlu untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai upaya untuk merencanakan pengembangan wilayah seperti apa yang sesuai dengan kondisi masing-masing tempat. Untuk sumberdaya fasilitas yang meliputi sarana prasarana pra panen (saat budidaya) dan pasca panen juga masih dirasa kurang. Karena program pengembangan kawasan agropolitan merupakan program yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan agribisnis, maka sarana prasarana pasca panen juga sangat diharapkan terpenuhi dengan baik, seperti alat pengolahan dan alat pengemasnya, misalkan *cold storage*, dan gudang penyimpanan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Hampir seluruh anggota tim koordinasi adalah kepala SKPD sehingga mereka memiliki kewenangan untuk menentukan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya terkait dengan program pengembangan kawasan agropolitan. Dukungan kepala SKPD sangat mempengaruhi keberhasilan program terutama disebabkan karena kewenangannya untuk menentukan jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan yang menjadi prioritas program dimaksud. Kepala SKPD yang bertindak sebagai anggota tim koordinasi, mendistribusikan tugas dan wewenangnya kepada anggota tim kelompok kerja yang dibawahinya. Sehingga kepala SKPD hanya bertindak sebagai koordinator, sedang yang menjalankan tugas dan wewenangnya adalah anggota tim kelompok kerja yang berada dibawahnya, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang terkait dengan program. Seluruh aparat pelaksana tersebut tidak hanya dituntut untuk menerima adanya kebijakan program pengembangan kawasan agropolitan, namun lebih dari itu mereka lebih dituntut untuk berkomitmen dalam pelaksananya dan mewujudkan tujuan serta target-targetnya.

Komitmen hendaknya dimiliki oleh segala lapisan, baik dari berbagai lapisan pemerintahan, juga berbagai lapisan masyarakat agar semua memiliki rasa memiliki program dan berpartisipasi dalam pelaksananya. Komitmen yang diharapkan hendaknya berupa wujud nyata melalui program dan kegiatan SKPD yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan agropolitan. Sebagian besar responden menilai bahwa komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, namun prioritas terhadap jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan dari program pada masing-masing instansi perlu untuk ditingkatkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi hendaknya dilakukan secara terintegrasi. Namun pada kenyataannya sikap egosektoral tidak dapat dilepaskan dalam menentukan kegiatan di setiap instansi, sehingga program pengembangan kawasan agropolitan tidak mendapatkan prioritas yang utama.

Struktur Birokrasi

Edward III [1] menyatakan bahwa pelaksana dapat terhambat oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Terdapat dua karakteristik yang menonjol dari birokrasi, prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Keduanya dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang memerlukan kerja sama dari banyak orang. SOP dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai tugas dan kewajiban tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri No.43 tahun 2010 yang antara lain meliputi koordinasi, monitoring, pelaporan. Fragmentasi atau pembagian bidang kerja secara rinci diatur dalam surat [4].

Sebagian besar responden setuju bahwa dalam struktur birokrasi, pembagian tugas telah sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi dan telah dibagi pada masing-masing bidang yang bersangkutan. Sedang untuk koordinasi dan monitoring belum mencakup keseluruhan bidang dan belum dilakukan secara rutin. Koordinasi dan monitoring hendaknya diupayakan agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan bisa berjalan serasi dan menghasilkan sinergi untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian tujuan. Koordinasi dan monitoring yang demikian merupakan upaya untuk menghasilkan kegiatan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Koordinasi yang dilakukan dirasa hanya melibatkan instansi-instansi tertentu yang memiliki kegiatan yang bersinggungan langsung dengan program tersebut. Koordinasi antar anggota masih dirasa sangat kurang sehingga masing-masing instansi melaksanakan program secara parsial dan tidak terintegrasi. Demikian juga mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan, selama ini belum pernah ada laporan secara khusus mengenai program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo. Hal itu terjadi karena program ini melibatkan banyak instansi dan kegiatan melekat pada masing-masing instansi.

Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam penelitian ini diukur dengan melihat target dan sasaran program. Target dan sasaran dalam *Masterplan* Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten

Probolinggo belum dinyatakan secara rinci. Hal ini menyebabkan pengukuran keberhasilan masing-masing output sulit diukur secara aktual. Sebagian besar responden setuju bahwa implementasi program Pengembangan Kawasan Agropolitan mampu mencapai target sesuai dengan indeks performa yang tercantum pada Masterplan Agropolitan Kabupaten Probolinggo, namun belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya penajaman strategi, perencanaan dan implementasi di lapangan. Terutama dalam menetapkan indikator dalam pencapaian target program hendaknya lebih bisa diukur secara kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat terlihat secara jelas. Adapun indikator yang dimuat dalam *Masterplan* agropolitan diantaranya adalah: (1) Mampu menyediakan bibit unggul; (2) Mampu menyediakan air bersih dan air irigasi; (3) Mampu mengembangkan Sumberdaya Manusia petani yang terlatih dan terampil; (4) Mampu menyediakan modal bagi pelaku usaha; (5) Mampu mengembangkan pelaku industri olahan; (6) Mampu menyediakan sarana infrastruktur bangunan seperti gudang penyimpanan; (7) Mampu menyediakan sarana infrastruktur transportasi, seperti jalan raya; (8) Mampu meningkatkan pemasaran hasil industri olahan; (9) Mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dalam hal pendapatan.

Hasil dari survey menunjukkan bahwa hampir 50% dari jumlah responden berpendapat bahwa implementasi program pengembangan kawasan agropolitan telah mampu dalam pencapaian target yang tercantum dalam *Masterplan* agropolitan walaupun tingkat pencapaiannya masih belum maksimal. Perlu adanya kerjasama yang lebih fokus antar instansi dan masyarakat yang terkait untuk mewujudkannya. Untuk penyediaan bibit unggul, dalam program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo lebih terfokus pada sektor pertanian yakni dari pertanian sendiri dan peternakan. Bibit unggul bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura telah memiliki pusat dalam pengolahan benihnya, yaitu UPB (Unit Pengolahan Benih). Terdapat dua kecamatan yang memiliki Unit Pengolahan Benih, yaitu kecamatan Paiton dengan unit pengolahan benih padi (tanaman pangan), dan kecamatan Sumber dengan unit pengolahan benih kentang (tanaman hortikultura). Sedang untuk bidang peternakan, unit pembenihan sapi unggul terdapat di Kecamatan Krucil. Untuk air irigasi dan air bersih,

yang menjadi *leading sector*nya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Untuk Dinas Pertanian sendiri setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan, pembangunan sumur dangkal untuk menyediakan air bersih, penyediaan pompa air, dan pembangunan embung untuk mempertahankan ketersediaan air terutama di daerah-daerah pegunungan.

Sumberdaya manusia petani yang terlatih dan terampil sangat didukung oleh Dinas Pertanian yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Pertanian memfasilitasi petani-petani di Kabupaten Probolinggo dengan mengadakan sekolah-sekolah lapang dan pelatihan-pelatihan sejenis pelatihan untuk kegiatan *on farm*, yaitu kegiatan budidaya pertanian mulai dari penyediaan benih, bercocok tanam, hingga panen, serta kegiatan *off farm*, yaitu kegiatan pasca panen, mengolah produk hasil pertanian menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang terlatih dan terampil ini erat kaitannya dengan indikator yang lain yaitu pengembangan pelaku industri olahan dan pemasaran hasil industri olahan. Dengan adanya kerjasama antar instansi terkait, diharapkan pencapaian target akan semakin optimal yaitu kegiatan pengembangan industri olahan dan pelaku usaha yang akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berupa naiknya pendapatan yang diterima.

Usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha industri olahan selain membutuhkan sumberdaya produksi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, juga harusnya didukung oleh permodalan yang akan mengembangkan usaha mereka. Permodalan yang diterima masyarakat selain dari Dinas-Dinas yang terkait, juga berasal dari pihak perbankan yang bekerjasama dengan pemerintah. Pihak pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat petani berupa bantuan sosial (bansos) yaitu uang tunai untuk meningkatkan usaha budidaya maupun pengolahan pasca panen. Sedang untuk perbankan, mereka memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman modal uang dengan perjanjian pengembalian dalam kurun waktu tertentu. Indikator lain dalam implementasi program pengembangan kawasan agropolitan adalah

tersedianya sarana infrastruktur bangunan dan infrastruktur transportasi yaitu jalan raya. Untuk infrastruktur bangunan, biasanya berupa pusat agribisnis, rumah kompos, dan gudang penyimpanan. Sedang untuk infrastruktur transportasi berupa jalan yang bersifat umum, yang menjadi leading sektor adalah Dinas Bina Marga, sedang jalan yang fokus ke usaha pertanian, yang memiliki kegiatan adalah Dinas Pertanian. Dalam kurun waktu hampir empat tahun terakhir, mulai tahun 2011 hingga 2014, Dinas Pertanian telah membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan memasarkan hasil-hasil produksi budidaya maupun produksi hasil olahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, dengan tingkat pengaruh sedang, dan sumbangan varians sesuai atau tidaknya output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah sebesar 51,4%. Sedangkan sisanya sebesar 48,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
2. Secara parsial, semua variabel bebas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat (output implementasi program pengembangan kawasan agropolitan) dengan masing-masing tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05 (\alpha)$.

Saran

1. Faktor komunikasi adalah faktor yang paling dominan dalam implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Oleh sebab itu komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda sebagai leading sector harus mencakup semua anggota instansi Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja dan tidak hanya berfokus pada instansi yang bersinggungan secara langsung terhadap program sehingga semua instansi dapat turut terlibat dalam upaya mencapai tujuan program;
2. Perlunya mengkaji ulang isi dari Masterplan Agropolitan terkait dengan program-program kegiatan masing-masing instansi harus jelas serta sasaran dan target yang ditentukan hendaknya dibuat secara bertahap dan

memiliki unsur kuantitatif, sehingga capaian-capaian secara berkala dapat dimonitoring dengan jelas;

3. Memberikan label pada produk-produk yang sudah di hasilkan dari kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan pada masing-masing kecamatan agar mampu mengangkat citra kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan itu sendiri;
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas cakupan penelitian terkait Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, misalnya berdasar wilayah kota lain, di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu dapat pula ditambahkan variabel dan item lain selain yang digunakan dalam penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, MS selaku Komisi Pembimbing I.
2. Bapak Dr. Irwan Noor, MA. selaku Komisi Pembimbing II dan juga selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Kepala Pusbindiklatren BAPPENAS di Jakarta, yang telah memberikan donasi beasiswa.
5. Semua pihak terkait yang membantu penulis dalam menyelesaikan publikasi ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*, New York: Congressional Quarterly Press
- [2]. Hill, Michael and Peter Hupe. 2010. *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications Ltd
- [3]. Grindles, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princenton University Press
- [4]. Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 440/906/426.12/2008 tentang Tim Kelompok Kerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo
- [5]. Abdulwahab, Solichin. 1990a. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta